

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



Rencana Kerja
(renja)
2025



DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat dprd;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 13

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat disusun yang berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang berguna sebagai acuan Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang sosial yang akan berjalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dan telah memberikan manfaat besar terhadap masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Oleh karena itu perencanaan-perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang termarginalkan di Kota Payakumbuh adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan dipedomani untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait terutama bidang-bidang tugas, sehingga program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renja ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan dan penyajian data. Untuk itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Renja ini dengan harapan Renja yang telah dibuat ini dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Payakumbuh, 2024
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP. 19671231 199203 1 041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial...	19
2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	20
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial	34
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	
	43
P E N U T U P	62

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2023	12
TABEL 2.2	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	26
TABEL 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025	29
TABEL 2.4	PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2024 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	41
TABEL 2.5	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025	42
TABEL 3.1	TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL REVIU DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH	44
TABEL 3.2	RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	47
TABEL 4	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama 1 (satu) tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2026.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut diatas, disusun program wajib dan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya dan faktor-faktor pendukung. Penyusunan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan yang sistematis, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Perencanaan yang dibuat merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2025 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587), sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 62);
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
31. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan renja Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk sebagai berikut :

1. Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kedepan
2. Menetapkan rencana kerja 1 (satu) tahun untuk tahun anggaran berikut sebagai dasar dalam penetapan APBD tahun anggaran berikut
3. Menetapkan program, kegiatan, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dilaksanakan dan dicapai yang dituangkan dalam dokumen renja Dinas Sosial

Tujuan penyusunan renja Dinas Sosial ini adalah :

1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya.
2. Dokumen yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.
3. Gambaran yang jelas dan terarah mengenai sasaran, tujuan dan hasil yang akan dicapai dari renstra Dinas Sosial yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai dari rencana kerja dan rencana kerja tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh tahun 2024
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang dituangkan dalam DPA Tahun 2023 berjumlah Rp. 9.824.778.180- terealisasi sebesar Rp. 8.584.385.416,- atau (87,37%) dengan sisa anggaran terdiri dari :

1. Sekretariat sebanyak 1 program dengan 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan, dukungan dana sebesar Rp. 3.283.863.180,- terealisasi sebesar Rp. 2.746.196.206,- (83,63%) sisa sebesar Rp. 537.666.974,-
2. Bidang Rehabilitasi Sosial 3 program dengan 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 6.182.154.840,- terealisasi sebesar Rp. 5.502.683260,- (88,99%) sisa sebesar Rp 680.471.580,-
3. Bidang Pemberdayaan Sosial 2 program dengan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 357.760.160,- terealisasi sebesar Rp. 335.505.950,- (93,78%) sisa sebesar Rp.22.254.210,-

Sesuai dengan penjelasan diatas terlampir dalam format 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
				4,063,343,589		4,063,343,589		9,824,778,180		8,584,385,416		12,647,729,005		311.26	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	90	3,176,677,286		3,176,677,286	90	3,283,863,180	80	2,746,196,206	80	5,922,873,492	100,00	186.45	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	1	124,116,840	17 dokumen	71,659,900	1	40,891,140	1	39,988,450	1	111,648,350	100,00	89.95	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	112,151,340	4 dokumen	66,124,000	4 dokumen	34,908,750	9 dokumen	34,509,900	8 dokumen	100,633,900	100,00	89.73	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	7,968,480	5 dokumen	3,740,000	5 laporan	3,984,240	8 laporan	3,692,450	3 dokumen	7,432,450	100,00	93.27	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang	3,997,020	9 dokumen	1,795,900	4 laporan	1,998,150	3 laporan	1,786,100	2 dokumen	3,582,000	100,00	89.62	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
			Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85	4,634,046,218	22 orang	2,174,275,281	85	2,480,680,569	100	1,961,961,570	85	4,136,236,851	100,00	89.26	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang	4,634,046,218	22 orang	2,174,275,281	19 orang	2,317,023,109	17 orang	1,813,583,170	23 orang	3,987,858,451	100,00	86.06	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 dokumen	163,657,460	12 dokumen	148,378,400	12 dokumen	148,378,400	100,01	100.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN yang sesuai standar	1		0.8	16,943,040	1	15,408,280	98	15,370,000	100	32,313,040	100.02	100.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 stel		32 stel	16,943,040	32 paket	15,408,280	32 paket	15,370,000	32 paket	32,313,040	100,03	100.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	1	429,224,470	80	320,054,638	1	214,612,235	100	212,489,765	80	532,544,403	80	124.07	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis, 26 buah	5,350,500	12 jenis	3,027,000	8 paket	2,675,250	8 paket	2,498,000	2 jenis, 10 buah	5,525,000	30	206.52	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis	-	3 jenis	35,692,500					0	35,692,500	0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 item	58,436,570	87 item	29,902,500	5 paket	29,218,285	5 paket	27,913,200	45 item	57,815,700	60	197.88	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Jenis	23,994,440	11 jenis	15,135,000	2 paket	11,997,220	2 paket	11,621,050	3 jenis	26,756,050	50	111.51	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 eksemplar	6,240,960	2 jenis	3,602,000	2 dokumen	3,120,480	2 dokumen	2,894,000	365 eksemplar	6,496,000	80	104.09	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1208 porsi	6,050,000	120 porsi	4,196,500	10 laporan	3,025,000	10 laporan	3,004,300	1000 porsi	7,200,800	20,00	119.02	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali	329,152,000	30 kali	228,499,138	30 laporan	164,576,000	30 laporan	164,559,215	10 kali	393,058,353	16,67	119.42	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana Kantor					1	47,025,000	100	46,440,000	100	46,440,000	100	100.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 unit	36,075,000	4 unit	35,750,000	4 unit	35,750,000	100	100.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4 unit	10,950,000	4 unit	10,690,000	4 unit	10,690,000	100	100.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	1	595,771,912	100	295,933,816	1	297,885,956	1	295,478,521	1	591,412,337	0.1375	99.27	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	205 buah	2,205,000	62 buah	640,000	1 laporan	1,102,500	1 laporan	980,000	4 kali, 205 buah	1,620,000	100	73.47	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	7,496,800	6 rekening	2,279,880	12 laporan	3,748,400	12 laporan	2,103,806	6 rekening	4,383,686	100	58.47	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 orang	586,070,112	11 orang	293,013,936	12 laporan	293,035,056	12 laporan	291,672,176	11 orang	584,686,112	100	99.76	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	1	374,720,000	15 unit/tahun	152,562,805	100	187,360,000	100	174,467,900	100	327,030,705	70	87.27	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit/tahun	78,380,000	1 unit/tahun	30,218,750	1 unit	39,190,000	1 unit/tahun	38,330,500	1 unit/tahun	68,549,250	100	87.46	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit/tahun	276,400,000	11 unit/tahun	113,379,055	17 unit	138,200,000	17 unit/tahun	126,994,400	11 unit/tahun	240,373,455	100	86.97	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 jenis	19,940,000	4 unit/tahun	8,965,000	12 unit	9,970,000	12 unit/tahun	9,143,000	4 jenis	18,108,000	100	90.81	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	0.65	323,835,960	100	235,823,020	0.65	285,753,620	5	266,503,800	5	502,326,820	69	155.12	
	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan					1	99,830							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan uang dan barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					1 dokumen	99,830							
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	1	323,835,960	100	235,823,020	1	285,653,790	100	266,503,800	100	502,326,820	69	155.12	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	235,361,900	137 orang	91,432,450	137 orang	117,680,950	143 orang	116,649,250	120 orang	208,081,700	85	88.41	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	7,200,000	5 orang	29,621,050	5 orang	3,600,000	5 orang	3,600,000	3 orang	33,221,050	60	461.40	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	47 kelurahan	30,171,040	47 kelurahan	98,363,720	11 lembaga	159,350,040	11 lembaga	142,269,050	36 kelurahan	240,632,770	100	797.56	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluar ga	51,103,020	10 keluar ga	16,405,800	6 sertifi kat	5,022,800	6 sertifikat	3,985,500	5 keluarga	20,391,300	100	39.90	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	0.6	1,009,936,340	80	188,796,524	60	505,167,970	60	455,198,920	60	643,995,444	0.5	63.77	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	0.8	1,009,936,340	80	188,796,524	80	505,167,970	0.8	455,198,920	0.8	643,995,444	100	63.77	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	940,181,540	5 orang	181,829,464	90 orang	470,090,770	46 orang	444,598,420	15 orang	626,427,884	0.5	66.63	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang				1 orang	99,900		-					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang				1 orang	99,900		-					
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	34,238,500	12 orang	2,367,000	10 orang	17,119,250	10 orang	5,429,500	12 orang	7,796,500	0.5	22.77	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	35,516,300	7 orang	4,600,060	250 orang	17,758,150	12 orang	5,171,000	3 orang	9,771,060	0.5	27.51	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	1	199,800	314 KK, 1433 KK	1,153,377,000	1	5,660,104,570	0.25	5,038,487,840	0.03	6,191,864,840	20	3099031.45	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	1	199,800	314 KK, 1433 KK	1,153,377,000	1	5,660,104,570	0.25	5,038,487,840	0.03	6,191,864,840	20	3099031.45	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata			3 kegiatan	327,891,500	3 kegiatan	326,856,350	2 kegiatan	310,898,500		638,790,000			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			2393 jiwa	73,432,800	8200 Keluarga	147,256,220	8200 keluarga	139,802,590		213,235,390			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 KK,25 00 KK	199,800	314 KK, 1433 KK	752,052,700	2 keluar ga	99,900		-	314 KK, 1433 KK	752,052,70 0	15	376402 .75	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						5,185,892,1 00		4,587,786 ,750					
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tetangani	1	33,201,40 0	100	26,579,500	100	17,882,300	100	8,996,50 0	15	35,576,000	16.666 66667	107.15	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	1	33,201,40 0	100	26,579,500	100	17,692,400	100	8,996,50 0	15	35,576,000	16.666 66667	107.15	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kejadi an	33,201,40 0	7 kejadi an	26,579,500	25 kejadi an	16,600,700	20 kejadi an	8,996,500		35,576,000	50	107.15	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang				1 orang	99,900							
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit				1 unit	991,800							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	1				1	189,900							
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung				2 kampung	99,900							
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang				2 orang	90,000							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja dan Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 10 +11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100		15	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	1	144,013,080	100	43,533,600	1	72,006,540	0.3	69,002,150	1	112,535,750	1	78.14		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	1	144,013,080	100	43,533,600	1	72,006,540	0.3	69,002,150	1	112,535,750	1	78.14		
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 lokasi	126,704,100	2 lokasi	42,872,600	2 dokumen	63,352,050	2 dokumen	60,838,400	2 lokasi	103,711,000	1	81.85		
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 lokasi	17,308,980	2 lokasi	661,000	289 makam	8,654,490	289 makam	8,163,750	289 makam	8,824,750	1	50.98		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									9,824,778,180		8,584,385,416		12,906,845,526			
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)														87.37		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program														Sangat Baik		

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga berupa kegiatan untuk memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan, pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal dan penyelenggaraan pemakaman mayat terlantar. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.758.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.171.000,- atau 29,12% dengan capaian output 100%. Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini dikarenakan sebagian besar kasus anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta orang terlantar dalam perjalanan tidak membutuhkan dana, hanya diberi pembinaan, membuat surat pernyataan dan ada yang dijemput keluarga. Selain itu, kasus mayat terlantar yang perlu difasilitasi juga tidak ada..
2. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pengiriman anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar ke panti-panti sosial dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan perawatan sosial. juga terdapat anggaran untuk memfasilitasi kegiatan pendamping rehabilitasi sosial kontrak Kementerian Sosial RI. Selain itu juga terdapat anggaran hibah yang diperuntukkan bagi Komda Lanjut Usia Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.119.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.429.500,- atau 31,72% dengan capaian output 75% .Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran kegiatan hibah bagi komda lansia tidak dapat di cairkan karena berdasarkan PP No 112 Tahun 2020, Komda Lansia sudah dibubarkan dan anggarannya tidak boleh dialihkan karena merupakan DAU Diarahkan..
3. Sub kegiatan Penyediaan Makanan berupa pemberian bantuan permakanan dan pelayanan untuk korban bencana alam atau bencana sosial sebanyak 25 kejadian, terealisasi sebanyak 20 kejadian. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.600.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.996.500,- atau 54,19% dengan capaian output 100%. Secara keuangan realisasi pada sub kegiatan ini memang rendah dikarenakan pencairan anggaran kegiatan ini berdasarkan situasional/

kebutuhan (bencana), akan tetapi seluruh bencana yang terjadi di Kota Payakumbuh sudah diberikan bantuan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kasubag, 7 (tujuh) orang Sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu

1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. **Kasubag Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
4. **Sub Koordinator Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.
5. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
6. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.
7. **Sub Koordinator Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.
8. **Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan.
9. **Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat.
10. **Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial.

11. **Sub Koordinator Perlindungan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial.
12. **Sub Koordinator Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023 berdasarkan kepada indikator kinerja umum yang telah ditetapkan sebagai mana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dapat dilihat pada lampiran renja ini (Format 2.2)

Tabel 2.2

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

NO	Indikator	SPM/Standar	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Nasional				2023	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13
	Persentase PPKS yang terlayani	√		√	%	80%	94%	85%	90%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial sebagai perangkat/lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dengan mengacu kepada SPM bidang Sosial dan RPD Kota Payakumbuh.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas dinas sosial yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;
- Masih kurangnya fasilitas umum yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- Belum optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan di bidang sosial sebagai berikut :

- Belum Optimalnya peran dari PSKS dalam mensosialisasikan program-program bantuan yang ada di Dinas Sosial;
- Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS sehingga butuh adanya pelatihan-pelatihan bagi PSKS;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan;
- Belum optimalnya penanganan Bencana dari tim cepat tanggap bencana ;
- Masih diperlukannya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial pada masyarakat kota Payakumbuh
- Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial;
- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial;

Sedangkan ancaman pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pelayanan antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan
- Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program social

- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kemandirian PMKS
2. Belum optimalnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Review terhadap RKPD tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target/tolak ukur dan dana yang dibutuhkan terlampir dalam format 2.3.

Berkaitan dengan keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Sosial 2024 dengan RKPD tahun 2024 antara lain :

- a. Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- b. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- c. Penyesuaian Pagu Indikatif Renja Dinas Sosial 2024 dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025
- d. Penyesuaian Indikator dan Tolak Ukur berupa :
 - Capaian Program
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Outcome)
 - Kelompok Sasaran Kegiatan
- e. Target Kinerja

TABEL 2.3

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7,140,369,475	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,940,369,545
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	93	3,463,109,420	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	93	3,507,809,971
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	35,115,150	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	35,115,150
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	28,650,350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	28,650,350
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	6,464,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Payakumbuh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	6,464,800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85	2,490,013,261	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	85	2,511,178,888

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2,317,023,261	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	2,338,188,888
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	172,990,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	172,990,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	100	17,002,240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	100	17,002,240
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Payakumbuh	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 paket	17,002,240	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Payakumbuh	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 paket	17,002,240
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100	291,518,850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Payakumbuh	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	100	291,518,850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Payakumbuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	3,913,650	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Payakumbuh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	3,913,650
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Payakumbuh	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item	44,896,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Payakumbuh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 paket	44,896,100

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Payakumbuh	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis	19,674,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Payakumbuh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	19,674,500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Payakumbuh	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	5,037,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	5,037,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Payakumbuh	Jumlah porsi nasi dan snack yang disediakan	1208 porsi	4,997,600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Payakumbuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	4,997,600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Payakumbuh	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	213,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Payakumbuh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	213,000,000
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Payakumbuh	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	147,951,359	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Payakumbuh	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	147,951,359
	Pengadaan mebel	Payakumbuh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	40,000,000	Pengadaan mebel	Payakumbuh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	40,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payakumbuh	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	40,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payakumbuh	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	40,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Payakumbuh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	2 unit	67,951,359	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Payakumbuh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	2 unit	67,951,359

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payakumbuh	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100	273,188,560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payakumbuh	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	100	296,723,484
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Payakumbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3,688,560	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Payakumbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3,688,560
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Payakumbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	269,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Payakumbuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	293,034,924
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payakumbuh	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100	208,320,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Payakumbuh	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	100	208,320,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	159,160,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	159,160,000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payakumbuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	9,970,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Payakumbuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	9,970,000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Payakumbuh	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70	277,028,480	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Payakumbuh	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	70	277,028,550
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100%	99,830	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	100%	99,900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 dokumen	99,830	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 dokumen	99,900
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100	276,928,650	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	100	276,928,650
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	137 orang	209,220,100	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	209,220,100

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	7,200,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	7,200,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 lembaga	50,451,350	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 lembaga	50,451,350
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Payakumbuh	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Sertifikat	10,057,200	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Payakumbuh	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat	10,057,200
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Payakumbuh	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99.9	569,834,115	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Payakumbuh	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99.9	569,834,115

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80	569,834,115	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	80	569,834,115
	Penyediaan Permakanan	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	451,657,265	Penyediaan Permakanan	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	451,657,265
	Penyediaan Sandang	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	99,750	Penyediaan Sandang	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	99,750
	Penyediaan Alat Bantu	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	56,562,800	Penyediaan Alat Bantu	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	56,562,800

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	17,722,550	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	17,722,550
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Payakumbuh	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	43,791,750	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Payakumbuh	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	43,791,750
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Payakumbuh	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100	2,699,685,395	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Payakumbuh	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100	1,454,984,844
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	2,699,685,395	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	1,454,984,844
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali	381,856,145	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40.000 orang	441,972,294
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa	147,256,050	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8200 keluarga	147,256,050
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Payakumbuh	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	3500 KK	2,004,816,700	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Payakumbuh	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	104 keluarga	700,000,000

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Payakumbuh	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	2 kelompok	165,756,500	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Payakumbuh	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	165,756,500
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Payakumbuh	Persentase korban bencana yang tetangani	100	50,621,800	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Payakumbuh	Persentase korban bencana yang tetangani	100	50,621,800
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100	50,422,300	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	100	50,422,300
	Penyediaan Makanan	Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	20 kejadian	50,222,800	Penyediaan Makanan	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	50,222,800
	Penyediaan Sandang	Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	8 orang	99,750	Penyediaan Sandang	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 orang	99,750
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Payakumbuh	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	8 orang	99,750	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Payakumbuh	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	99,750
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	100	199,500	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Payakumbuh	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	100	199,500

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Payakumbuh	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	99,750	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Payakumbuh	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	99,750
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	99,750	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Payakumbuh	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	99,750
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Payakumbuh	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100	80,090,265	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Payakumbuh	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	100	80,090,265
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100	80,090,265	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	100	80,090,265
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	56,595,065	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 dokumen	56,595,065

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	23,495,200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Payakumbuh	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	289 makam	23,495,200

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang berpedoman kepada Renstra Dinas untuk 1 tahun kedepan dilakukan dengan memperhatikan usulan pemangku kepentingan pada waktu musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan Forum OPD terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Selanjutnya usulan pemangku kepentingan tersebut disesuaikan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Daftar usulan program dan kegiatan yang di usulkan masyarakat disajikan dalam bentuk persandingan hasil musrenbang kecamatan dengan Renja Dinas Sosial pada lampiran (Tabel 2.4 dan 2.5)

Tabel 2.4

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024					Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		
N O	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nihil					
						-	

Tabel 2.5

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Pembinaan Karang Taruna Kelurahan se Kota Payakumbuh	15 orang	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Bulan Bhakti Karang Taruna	1 paket	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Pemberian atribut dan kelengkapan pengurus karang taruna se Kota Payakumbuh	150 stel	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan RPD Kota Payakumbuh yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Peningkatan penanggulangan PMKS
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah social dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan social
4. Peningkatan kesejahteraan social berbasis keluarga

Arah kebijakan lainnya terkait dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
- b. Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi
- c. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sosial terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu

selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain:

1. Rekomendasi Bappeda Kota Payakumbuh

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator agar disesuaikan dengan cascading perangkat daerah.

2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Dinas
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Tahun 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	-	80	85	90	95	

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Perumusan Program dan Kegiatan (Format 5) antara lain :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan dengan sasaran Meningkatnya PPKS yang terlayani di Kota Payakumbuh. Sasaran ini dicapai dengan strategi meningkatkan peran seluruh elemen dalam pengentasan kemiskinan.

2. Pencapaian SDGs

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung pencapaian tujuan 1 (satu) SDGs yaitu: menanggulangi kemiskinan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung Program pengentasan Kemiskinan yang sudah merupakan program prioritas di Renstra dan Renja Dinas Sosial.

4. Pencapaian SPM

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 pada Dinas Sosial terdapat 6 Program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan lokasi menyebar di seluruh kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total kebutuhan dana menurut sumber pendanaan :

- Sumber APBD Kota Payakumbuh : Rp. 9.824.778.180,-

Selanjutnya rincian program dan kegiatan menurut sumber pendanaan APBD Kota, APBN dan APBD Propinsi dapat dilihat pada Format 3.2.

TABEL 3.2

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,940,369,545				5,459,382,530
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinsos	Kota Payakumbuh	91	3,507,809,971	DAU		91	3,197,806,135
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	Kota Payakumbuh	100	35,115,150	DAU		100	38,845,740
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	9 Dokumen	28,650,350	DAU		9 Dokumen	32,863,350
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	13 laporan	6,464,800	DAU		13 laporan	5,982,390
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	Kota Payakumbuh	85	2,511,178,888	DAU		85	2,473,940,985
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	Kota Payakumbuh	23 orang	2,338,188,888	DAU		23 orang	2,317,022,985
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Payakumbuh	12 dokumen	172,990,000			12 dokumen	156,918,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	Kota Payakumbuh	100	17,002,240	DAU		100	17,002,240
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Payakumbuh	32 paket	17,002,240	DAU		32 paket	17,002,240
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	Kota Payakumbuh	100	291,518,850	DAU		100	178,204,550
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Payakumbuh	8 paket	3,913,650	DAU		8 paket	4,000,000

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Payakumbuh	6 paket	44,896,100	DAU		6 paket	39,554,250
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Payakumbuh	2 paket	19,674,500	DAU		2 paket	14,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Payakumbuh	2 dokumen	5,037,000	DAU		2 dokumen	4,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Payakumbuh	10 laporan	4,997,600	DAU		10 laporan	3,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumbuh	40 laporan	213,000,000	DAU		40 laporan	113,150,300
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kota Payakumbuh	100%	147,951,359	DAU		100%	86,900,755
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Payakumbuh	3 paket	40,000,000	DAU		3 paket	48,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Payakumbuh	2 unit	40,000,000	DAU		2 unit	8,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Payakumbuh	2 unit	67,951,359	DAU		2 unit	30,900,755
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	100	296,723,484	DAU		100	302,452,620
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Payakumbuh	12 laporan	3,688,560	DAU		12 laporan	10,795,380
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Payakumbuh	12 laporan	293,034,924	DAU		12 laporan	291,657,240
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	Kota Payakumbuh	100	208,320,000	DAU		100	187,360,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Payakumbuh	1 unit	39,190,000	DAU		1 unit	39,190,000

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Payakumbuh	17 unit	159,160,000	DAU		17 unit	138,200,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Payakumbuh	12 unit	9,970,000	DAU		12 unit	9,970,000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kota Payakumbuh	70	277,028,550	DAU		70	183,421,170
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	Kota Payakumbuh	100%	99,900	DAU		100%	99,830
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Payakumbuh	1 dokumen	99,900	DAU		1 dokumen	99,830
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	Kota Payakumbuh	100	276,928,650	DAU		100	183,421,170
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	137 orang	209,220,100	DAU		137 orang	119,220,950
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	5 orang	7,200,000	DAU		5 orang	3,600,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	11 lembaga	50,451,350	DAU		11 lembaga	50,452,960
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	54 Sertifikat	10,057,200	DAU		54 Sertifikat	10,147,260
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	Kota Payakumbuh	99.9	569,834,115	DAU		99.9	370,175,170

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	Kota Payakumbuh	80	569,834,115	DAU		80	370,175,170
	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	90 orang	451,657,265	DAU		90 orang	335,097,970
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	99,750	DAU		1 orang	99,900
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	56,562,800	DAU		1 orang	99,900
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	20 orang	17,722,550	DAU		20 orang	17,119,250
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	15 orang	43,791,750	DAU		15 orang	17,758,150
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	Kota Payakumbuh	100	1,454,984,844	DAU		100	1,490,367,235
V	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	Kota Payakumbuh	100	1,454,984,844	DAU		100	1,490,367,235
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Payakumbuh	40.000 orang	441,972,294	DAU		40.000 orang	326,856,250
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	8200 keluarga	147,256,050	DAU		8200 keluarga	147,156,320
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	104 keluarga	700,000,000	DAU		104 keluarga	1,016,254,765

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	165,756,500	DAU		1 orang	99,900
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tetangani	Kota Payakumbuh	100	50,621,800	DAU		100	50,621,800
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	Kota Payakumbuh	100	50,422,300	DAU		100	50,422,300
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	25 orang	50,222,800	DAU		25 orang	50,222,800
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 orang	99,750	DAU		1 orang	99,750
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	1 unit	99,750	DAU		1 unit	99,750
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	Kota Payakumbuh	100	199,500	DAU		100	199,500
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	2 kampung	99,750	DAU		2 kampung	99,750
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	15 orang	99,750	DAU		15 orang	99,750
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	Kota Payakumbuh	100	80,090,265	DAU		100	80,090,265
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	Kota Payakumbuh	100	80,090,265	DAU		100	80,090,265

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	2 dokumen	56,595,065	DAU		2 dokumen	56,595,065
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	289 makam	23,495,200	DAU		289 makam	23,495,200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Usulan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan sumber dana DAU Tahun 2025 sesuai pagu indikatif sementara Tahun 2025, format 6 terlampir.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS SOSIAL						6.940.388.646,00							4.814.624.730,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.940.388.646,00							4.814.624.730,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.940.388.646,00							4.814.624.730,00		
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Sosial Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat	-				84 Indeks A Kategori							3.346.606.680,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	-				100 %					Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	32.855.500,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	2.207.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		30.857.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	53.219.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		1.998.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	-				87 %	2.512.239.675,00					Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	2.473.940.985,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 Orang/bulan	2.366.239.675,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.317.022.985,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	156.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		156.918.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawalan ASN Inspektorat yang sesuai Standar	-				100 %	32.000.000,00					Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	17.002.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		17.002.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	-			100 %	365.338.700,00			-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	267.070.235,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.884.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.675.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	108.036.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		108.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	33.585.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		29.222.285,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.090.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		11.997.220,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.343.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		3.120.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	4.601.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		2.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	195.798.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		109.755.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi/ kebutuhan sarana prasarana Kantor	-			100 %	251.541.000,00			-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	64.824.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	163.923.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		32.412.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	87.618.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh		32.412.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	-			100 %	357.458.620,00			-	-	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	302.452.620,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.688.560,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		10.795.380,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	353.769.960,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh		291.657.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	-			100 %	273.060.000,00			-	-	BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh	-	187.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.950.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh		39.190.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				17 Unit	216.540.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh		138.200.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARJET REJENIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesh Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesh Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	13.470.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh		9.970.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	-			70 %	386.068.000,00						-	283.287.880,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	-			100 %	11.311.500,00			-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	99.830,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	11.311.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh		99.830,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	-			65 %	383.747.500,00			-	-	PSKS Kota Payakumbuh	-	263.168.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	224.220.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PSKS Kota Payakumbuh		119.220.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	23.760.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PSKS Kota Payakumbuh		3.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Lembaga	125.710.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PSKS Kota Payakumbuh		130.199.840,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Sertifikat	10.057.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	PSKS Kota Payakumbuh		10.147.260,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARJET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARJET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARJET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase PPKS yang terlayani	-			86 %	618.821.860,00						-	370.075.270,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas tertantar, anak tertantar, lanjut usia tertantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi/ kebutuhan dasarnya di luar panti	-			80 %	518.621.650,00			-	-	Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh	-	370.075.270,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemukiman														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	440.984.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		335.097.970,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pasokan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	16.207.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	17.717.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		17.119.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	43.712.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh		17.758.150,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	-			100 %	1.003.648.800,00						-	474.312.200,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjut	-			100 %	1.003.543.600,00			-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	474.312.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	239.667.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh		326.856.350,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENY OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8200 Keluarga	171.761.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh		147.256.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Keluarga	99.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh		99.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				323 Orang	992.016.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh		99.900,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	-			100 %	71.081.000,00						-	88.218.660,00	
	1.06.06.2.01	Perfindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi/kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-			100 %	50.895.000,00					Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh	-	68.017.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyalangan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	50.697.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		67.817.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	99.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		99.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	99.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh		99.750,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENYIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terdapat Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	-			100 %	20.136.000,00			-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	199.500,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana															
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	99.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh		99.750,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana															
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	20.037.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kota Payakumbuh		99.750,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	-			100 %	106.060.000,00						-	93.147.250,00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	-			100 %	105.050.000,00			-	-	Taman Makam Pahlawan	-	93.147.250,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				2 Dokumen	56.592.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Taman Makam Pahlawan		59.652.050,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				289 Makam	48.458.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Taman Makam Pahlawan		23.495.200,00	DINAS SOSIAL	
			J U M L A H						6.940.388.545,00							4.814.624.730,00	

PENUTUP

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan pagu sementara yang disediakan, urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar maka perlu diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi nasional, propinsi dan daerah sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya
- b. Rencana Tindak lanjut

Program kegiatan yang disusun ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan survey lapangan, proposal dari masyarakat serta situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

Demikian renja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Payakumbuh, Juni 2024
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI, SN, S.IP
NIP. 19820328 201001 1 009

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS SOSIAL**

Jln. Gelatik (Puti EloK), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh
Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (0752) 91895
email : dinsospyk@gmail.com

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk In put, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Rehabilitasi Sosial	Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih, Anak Terlantar yang berusia 5-18 tahun dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.	1). Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas 2). Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan 3). Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 4). Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	1). Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang disabilitas masih banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Menyediakan bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh	Input : Lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh Output : Meningkatkan bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh Outcomes : Tersedianya bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh	Input : Lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang dibantu sudah Responsif Gender Output : Meningkatnya bantuan permakanaan yang responsif gender bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh Outcomes : Banyaknya lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang terbantu secara responsif gender permakannya sehingga dapat mengurangi biaya hidup sehari-hari
Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.								
Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan								
Tujuan : 1. Membantu memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanaan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti. 2. Meningkatkan kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keluarga/orang lain. 3. Memenuhi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).								

Payakumbuh, 28 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI, SN. S.IP
NIP.19820328 201001 1 009



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS SOSIAL**

Jln. Gelatik (Puti EloK), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh
Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (0752) 91895
email : dinsospyk@gmail.com

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/ SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk Input, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Pemberdayaan Sosial	Masih banyaknya potensi-potensi yang ada pada PSM yang belum maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS di Kota Payakumbuh	1). Dari aspek akses keterlibatan PSM dalam melayani PPKS baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas 2). Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan 3). Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan PSM dalam melayani PPKS yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 4). Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah PSM yang belum maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS di Kota Payakumbuh	1). Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). PSM masih banyak yang belum maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS di Kota Payakumbuh	Meningkatnya jumlah SDM PSM yang mampu dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh dengan responsif gender	PSM memberikan pelayanan kepada PPKS di Kota Payakumbuh dengan responsif gender	Input : Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Payakumbuh Output : Meningkatkan kemampuan SDM PSM dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh yang responsif gender Outcomes : Tersedianya PSM yang melayani PPKS di Kota Payakumbuh dengan responsif gender	Input : PSM dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh sudah responsif gender Output : Meningkatnya kemampuan SDM PSM dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh yang responsif gender Outcomes : Banyaknya PSM yang memberikan pelayanan kepada PPKS di Kota Payakumbuh dengan responsif gender
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
Tujuan : 1. Meningkatkan kemampuan dan potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya didalam program kesejahteraan sosial 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Payakumbuh								

Payakumbuh, 28 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI, SN. S.IP
NIP. 19820328 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS SOSIAL

Jln. Gelatik (Puti Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh

Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (0752) 91895

email : dinsospyk@gmail.com

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh

TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan
Kode kegiatan	1.06.04.2.01.01
Analisis Situasi	<ol style="list-style-type: none">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih, Anak Terlantar yang berusia 5-18 tahun, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender<ol style="list-style-type: none">a. Faktor Kesenjangan<ol style="list-style-type: none">1) Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas2) Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan3) Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis di luar panti di Kota Payakumbuh yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.b. Penyebab Internal Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatanc. Penyebab Eksternal<ol style="list-style-type: none">1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender2) Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis masih banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

Rencana Tindak	Kegiatan	Pemberian Bantuan berupa Bahan Makanan yang responsif gender kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis	
	Tujuan	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan yang responsif gender bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis	
	Aktivitas 1	Pemberian bantuan Bahan Makanan	
	Sumber Daya/Input	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas, Gelandangan dan pengemis sebanyak 120 orang	
	Output	Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis yang diberi bantuan permakanan yang responsif gender	
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 441.041.265	
	SDM	120 Orang	
Dampak / Hasil / Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan yang responsif gender bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis		

Payakumbuh, 28 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP

NIP. 19820328 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS SOSIAL

Jln. Gelatik (Puti Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh

Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (0752) 91895

email : dinsospyk@gmail.com

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh

TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Pemberdayaan Sosial		
Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Kode kegiatan	1.06.02.2.03.0001		
Analisis Situasi	<ol style="list-style-type: none">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Masih banyaknya potensi-potensi yang ada pada PSM yang belum maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS di Kota Payakumbuh2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender<ol style="list-style-type: none">a. Faktor Kesenjangan<ol style="list-style-type: none">1) Dari aspek akses keterlibatan PSM dalam melayani PPKS baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas2) Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan3) Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan PSM dalam melayani PPKS yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah PSM yang belum maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS di Kota Payakumbuhb. Penyebab Internal Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatanc. Penyebab Eksternal<ol style="list-style-type: none">1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender2) PSM masih banyak yang belum maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS di Kota Payakumbuh		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Tujuan	Meningkatnya kemampuan SDM PSM dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh yang responsif gender	

		Aktivitas 1	Pembinaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Payakumbuh
		Sumber Daya/Input	a. Jumlah PSM Tahun 2024 sebanyak 136 orang b. Jumlah PSM perempuan sebanyak 127 orang c. Jumlah PSM laki-laki sebanyak 9 orang
		Output	Jumlah SDM PSM yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh yang responsif gender
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 224.970.100	
	SDM	136 Orang	
Dampak / Hasil / Manfaat	Meningkatnya kualitas SDM PSM dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh yang responsif gender		

Payakumbuh, 28 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP. 19820328 201001 1 009

Lampiran Surat Nomor : 060/02/Setda-Pyk/2024

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	85%

Payakumbuh, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP. 19820328 201001 1 009

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kota : Payakumbuh
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	85%		

Jumlah Anggaran Kegiatan pada tahun 2023
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Rp 9.824.778.180,-
Rp 8.584.385.416,-

Payakumbuh, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP. 19820328 201001 1 009

CASCADING DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH 2024

KEPALA DINAS		
Sasaran :	Indikator :	Target
Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	80.00%
Program/ Kegiatan		Anggaran
Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3,283,863,180
Program Pemberdayaan Sosial		285,753,620
Program Rehabilitasi Sosial		505,167,970
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		5,660,104,570
Program Penanganan Bencana		17,882,300
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		72,006,540
		9,824,778,180

SEKRETARIS		
SASARAN :	INDIKATOR :	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase penyerapan anggaran	89%
	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	100%
Program/ Kegiatan :		Anggaran
Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		966,840,071
		966,840,071

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
SASARAN	INDIKATOR :	TARGET
Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana perkantoran	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	90%
Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	95%
	Persentase administrasi persuratan yang dilaksanakan	95%
	Persentase dokumen pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	90%
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Sosial	Persentase pemenuhan ASN dalam Perangkat Daerah sesuai dengan Anjab dan ABK	75%
Kegiatan/ Sub Kegiatan :		Anggaran
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40,891,140
01. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		34,908,750
02. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		3,984,240
03. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1,998,150
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,480,680,569
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,317,023,109
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		163,657,460
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15,408,280
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		15,408,280
Administrasi Umum Perangkat Daerah		214,612,235
01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,675,250
04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		29,218,285
05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11,997,220
06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3,120,480
08. Fasilitas Kunjungan Tamu		3,025,000
09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		164,576,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		47,025,000
06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		36,075,000
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10,950,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		297,885,956
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,102,500
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3,748,400
04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		293,035,056
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		187,360,000
01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		39,190,000
02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		138,200,000
06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9,970,000

SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN/PERENCANA AHLI MUDA		
SASARAN :	INDIKATOR :	TARGET
Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang tersedia	100%
	Persentase dokumen pelaporan yang tersedia	100%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	95%

BENDAHARA		
SASARAN :	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja Dinas Sosial	Jumlah penatausahaan keuangan terhadap penerimaan dan pengeluaran	12 Dokumen
	Jumlah pembukuan, laporan fungsional dan rekening koran yang dibuat dan dicetak	12 Dokumen
	Jumlah penataan dan pengarsipan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta SPJ dengan tertib dan teratur	12 Dokumen
	Jumlah rekonsiliasi SP2D dengan BUD	12 Dokumen

PRANATA KOMPUTER TERAMPIL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Sosial	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	9 dokumen
	Jumlah dokumen pelaporan yang dibuat	9 dokumen

PENGADMINISTRASI UMUM		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya administrasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah kegiatan kantor yang didokumentasikan	19 kegiatan

PENGADMINISTRASI PERSURATAN		
SASARAN :	Indikator	Target
Meningkatnya administrasi persuratan	Jumlah Surat Masuk yang diterima, dicatat, diarsipkan, diberikan penomoran dan didistribusikan	1200 berkas
	Jumlah Surat Keluar, Surat Tugas dan Surat Keputusan yang diterima, dicatat, diarsipkan, diberikan penomoran dan didistribusikan	1300 berkas

KABID PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	99,80%
Meningkatnya Penanganan Kemiskinan Terpadu	Persentase RTS yang telah diintervensi	80%
PROGRAM :		
Program Rehabilitasi Sosial	RP	505,167,970
Program Perlindungan dan Jaminan sosial	RP	5,660,104,570
Program Penanganan Bencana	RP	17,882,300
	RP	6,183,154,840

SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Jaminan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat PKH	40%
	Persentase PMKS yang mendapat Program Sembako	40%
Meningkatnya Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	90%
Kegiatan/ Sub Kegiatan		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Anggaran	5,333,248,220
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		147,256,220.00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		99,900.00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		5,185,892,100.00

SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL/ PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan perlindungan sosial	80%
Meningkatnya akurasi data kemiskinan	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	80%
Kegiatan/ Sub Kegiatan		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Anggaran	Rp326,856,350
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp326,856,350
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		Rp17,692,400
Penyediaan Makanan		Rp16,600,700
Penyediaan Sandang		Rp99,900
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Rp991,800
		Rp344,548,750

SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan permakanaan	2%
	Persentase PMKS yang mendapat layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga	80%
	Persentase PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25%
Kegiatan/ Sub Kegiatan		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Anggaran	Rp 505,167,970
Penyediaan Permakanaan		Rp470,090,770
Penyediaan Sandang		Rp99,900
Penyediaan Alat Bantu		Rp99,900
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp17,119,250
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp17,758,150

PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima rehabilitasi sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan	3 Dokumen

ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima rehabilitasi sosial	Jumlah data PMKS yang menerima bantuan permakanaan	1 dokumen
	Jumlah data PMKS yang menerima layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga	1 dokumen
	Jumlah data PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1 dokumen

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL

SASARAN :	Indikator	TARGET
Meningkatnya Kualitas PSKS	Persentase Tenaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS	90%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90
PROGRAM :		
1. Program Pemberdayaan Sosial		ANGGARAN Rp285,753,620
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Rp72,006,540 Rp357,760,160

SUB KOORDINATOR KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA		
SASARAN :	Indikator	TARGET
Meningkatnya Nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah kegiatan hari besar kepahlawanan yang dilaksanakan	5 Kegiatan
Kegiatan/ Sub Kegiatan		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	Rp72,006,540
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp63,352,050	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp8,654,490	

SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL, KELUARGA DAN MASYARAKAT/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA		
Sasaran:	Indikator	TARGET
Meningkatnya Penguatan kelembagaan PSKS	Persentase PSKS yang memiliki legal aspek	95%
	Persentase LKS yang aktif dalam LKKS	95%
Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS	Persentase Karang Taruna yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas	95%
Kegiatan/ Sub Kegiatan		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Cakupan Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	Rp164,372,840
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp159,350,040	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp5,022,800	

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAN PENGAWASAN/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA		
SASARAN :	Indikator	TARGET
Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS	Persentase TKSK dan PSM yang telah mengikuti latihan lanjutan	100%
Meningkatnya jaringan kerja dan fasilitas PSKS	Persentase kerjasama PSKS dalam penanganan PMKS	1 Kegiatan
Kegiatan/ Sub Kegiatan		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Cakupan Kabupaten/ Kota	ANGGARAN	Rp121,280,950
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp117,680,950	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp3,600,000	